

RAPAT KONSULTASI RKPd KONVERGENSI STUNTING DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

DINKES, 30 Juni 2021. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Rawas yang langsung dipimpin Ketuanya Azandri, S.IP pada tanggal 30 Juni 2021 Jam 14.50 Wib di Ruang Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas.



Dalam pidato pengantar Ketua Dewan mengaskan bahwa permasalahan stunting di Kabupaten Musi Rawas perlu mendapatkan prioritas karena penurunan stunting ini tidak signifikan kalau hanya dikerjakan oleh satu Instansi saja tetapi ini beban kita bersama, pemerintah, stakeholder bahkan lapisan masyarakat harus bergotong royong untuk mengatasi persoalan stunting ini, terang beliau.

Selanjut beliau juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang telah melaksanakan program konvergensi stunting ini secara masif dan berkesinambungan, walaupun demikian dalam forum ini kita perlu mencari rumusan yang ideal untuk Musi Rawas MANTAB, “bagaimana upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara signifikan”.

Seiring dengan program Musi Rawas MANTAB salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan indikator pembangunan manusia (IPM) sehingga kita bahas dalam forum ini. Salah satunya stunting sebagai faktor yang memengaruhi kualitas sumberdaya manusia tersebut. Stunting itu terjadi sebagai akumulasi kekurangan gizi kronis pada balita dimulai sejak usia 1000 hari kehidupan pertama (HKP) sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan balita, menjadi pendek, kerdil bahkan gangguan perkembangan otak. Istilah lain stunting dapat disebut gagal tumbuh. Teges Wakil Bupati Hj. Suwarti dalam Sambutannya pada Acara Rapat Konsultasi RKPD Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 – 2022.

Selanjutnya beliau memaparkan bahwa berdasarkan hasil Riset Kesehatan Daerah tahun 2013 bahwa angka stunting dilaporkan sebesar 37,8% menurun sekitar 30,8% pada tahun 2018. Penurunan yang tidak signifikan sehingga pemerintah mencari terobosan sebagai upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting dengan konvergensi stunting dan menetapkan desa lokus stunting, sehingga diharapkan pada tahun 2024 prevalensi stunting akan menurun sampai pada angka 14%.

Beberapa waktu yang lalu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah melakukan uji petik terhadap 722 balita yang dilaporkan stunting berdasarkan aplikasi eppbgm. Uji petik tersebut di Kecamatan Muara Beliti, Tugumulyo, Megang Sakti, Sukakarya dan Jayaloka. Fakta yang ditemui bahwa benar apa yang dilaporkan bahwa keluarga dengan balita stunting itu sangat miris, berbagai faktor kemiskinan, pendidikan, pola hidup, perumahan dan sanitasi tidak laik kesehatan bahkan hampir 60% balita yang diuji petik tidak memiliki kartu BPJS menyatu dalam kemelut ketidakberdayaan.

Berbagai masukan dalam forum ini menyikapi kondisi makro keluarga stunting seperti permasalahan sensitivitas dari berbagai organisasi perangkat daerah dari Kementerian Agama, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sosial, Pendidikan, Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian, Pekerjaan Umum Ciptakarya, termasuk juga permasalahan spesifik penanganan stunting disektor kesehatan, seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pembangunan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebesar 26.727.916.765.- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus enam Puluh Lima Rupiah).



Akhirnya Rapat Konsultasi RKPD ini pun menyepakati jadwal pelaksanaan Aksi#3 Konvergensi Stunting akan disinkronkan antara agenda kegiatan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas yang direncanakan dalam minggu pertama bulan Juli 2021.